

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hindia Belanda adalah wilayah Hindia yang dikuasai oleh Belanda. Istilah ini mulai digunakan sejak masa pendudukan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), ketika Belanda menguasai sebagian besar wilayah di Indonesia hari ini. Secara etimologis, kata Hindia Belanda berasal dari bahasa latin *Indus* dengan nama asli *Dutch Indies* atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Nederlandsch-Indië*, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi Hindia Timur Belanda.

Hindia Belanda merujuk pada penjelasan J. Riphagen dalam bukunya *Atoeran Pemerintahan Hindia Belanda*, merupakan sekumpulan pulau-pulau baik itu besar atau kecil. Diantaranya yaitu Jawa, Madura, Sumatera, Borneo, Celebes, Bangka Belitung, Pulau-pulau Sunda Besar dan Kecil, serta Maluku. Dinamai Hindia Belanda dikarenakan wilayah tersebut merupakan bagian dari pemerintahan Kerajaan Belanda (*Staat der Nederlanden* atau *Koninkrijk der Nederlanden*)¹.

Tujuan awal kedatangan Belanda ke Hindia Belanda atau Indonesia hari ini adalah dalam misi ekonomi. Kedatangan mereka diusung oleh VOC. VOC

¹ Jonh Riphagen, *Atoeran Pemerintahan Hindia Belanda*, (Weltevreden: Balai Pustaka, 1927), hal. 3-5.

merupakan serikat dagang Belanda paling sukses yang berdiri pada masanya. Bahkan hingga akhir tahun 1800, VOC tetap merupakan serikat dagang terbesar yang beroperasi di Asia. Kompeni dagang Belanda ini bertumbuh pesat didukung oleh beberapa faktor, salah satunya adalah dengan berlimpahnya modal yang dimiliki oleh republik Belanda kala itu menjadikan serikat dagang kompeni ini kuat dari segi militer yang kemudian mendukung monopoli². Selain itu, VOC diberi hak istimewa (hak oktroi) yang memungkinkan kompeni dagang ini mengatur wilayah dagangnya seperti sebuah negara otonom. Hak istimewa ini memberi VOC wewenang untuk menguasai perdagangan, memiliki angkatan perang, melakukan perjanjian, dan bahkan mencetak mata uang sendiri³.

Sumatera adalah wilayah paling penting bagi kolonial setelah Jawa⁴. Hal ini dikarenakan dalam perniagaannya VOC memperjualkan komoditi rempah yang bernilai tinggi dalam pasaran global. Salah satunya yaitu lada yang tumbuh subur di wilayah Indonesia Barat, terutama di wilayah Pantai Barat Sumatera⁵. Kondisi inilah yang mendorong VOC melakukan perjanjian dengan masyarakat Sumatera untuk mengokohkan misi monopoli dan

² Louisa Balk, dkk. *The archives of the Dutch East India Company (VOC) and the local institutions in Batavia* (Jakarta: Brill, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 2007), hal. 28-30.

³ Rosmaida Sinaga, dkk. Masa Pemerintahan VOC di Nusantara: Awal Kedatangan Hingga Penyebab Bubarnya VOC, *Ar-Rumman – Journal of Education and Learning Evaluation*, Vol. 1, No. 2, 2004, hal. 389-397.

⁴ Jonh Stroomberg, *Hindia Belanda 1930, 1st ed.* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hal. 7.

⁵ Nurarta Situmorang, *Naskah Sumber Arsip Rempah Nusantara Abad 17-18*, (Jakarta Selatan: Arsip Nasional Republik Inodnesia (ANRI), 2021), hal. 1-5.

perdagangannya. VOC juga melihat Padang sebagai sebuah wilayah yang tepat untuk menjadi kota administratifnya.

Pantai Barat Sumatera atau dalam istilah Belanda yang sejak abad XVIII M mulai disebut *west coast van Sumatera* merupakan nama yang diberikan oleh VOC sebagai sebutan untuk salah satu dari wilayah administratifnya. Pada tahun 1660 melalui perjanjian dengan Raja-raja Muda yang menjadi wakil dari Kerajaan Pagaruyung, Belanda berhasil menguasai Padang⁶. Kekuasaan ini kemudian diperkuat melalui pendirian loji-loji dagang serta penempatan komandan militer di wilayah pesisir. Langkah tersebut menjadi fondasi awal pembentukan struktur pemerintahan kolonial yang lebih permanen di kawasan ini.

Pembentukan wilayah administratif oleh kompeni ini bermula dari pembentukan loji VOC di Pulau Cingkuak tahun 1663, loji Padang tahun 1666, dan loji Air Bangis tahun 1669. Ketiga loji ini kemudian bertransformasi menjadi *comtoir* (Unit administratif dan juga perdagangan). Ketiga *comptoir* ini kemudian disatukan dalam *Hoofdcomtoir van Sumatra's Westkust*. Memasuki abad ke-18 M *Hoofdcomtoir van Sumatra's Westkust* telah mencakup kawasan pantai Barat Sumatera, dari Barus di utara hingga Indrapura

⁶ Walneg S. Jas, Windo Wibowo, *Padang di Persimpangan Jalan? Potret Dahulu, Kini, dan Visi Masa Depan*, (Jakarta: PT Visi Media Nusantara, 2015), hal. 56.

di selatan⁷. Adapun pemimpin di wilayah ini dipimpin oleh seorang Komondor⁸.

Wilayah Pantai Barat Sumatera dalam penyebutan masyarakat lokal merupakan wilayah Minangkabau yang secara masyarakat adat dipimpin oleh kepemimpinan tradisional. Pemimpin di Minangkabau adalah orang yang didahulukan *salangkah* dan ditinggikan *sarantiang*. Maka, pemimpin di Minangkabau adalah orang yang dipilih secara khusus oleh masyarakat sebagai seseorang yang mampu memimpin daerahnya, serta kepemimpinannya dekat dengan rakyat⁹.

Kepemimpinan di Minangkabau dijalankan dengan secara kolektif pada setiap jenjang kelurahan yang ada. Dalam adat Minangkabau, pemimpin disebut sebagai kepemiminan *tungku tigo sajarangan*¹⁰. *Tungku Tigo Sajarangan* adalah penguasaan masyarakat Minangkabau yang terdiri dari *niniak mamak*, alim ulama, dan *cadiak pandai*¹¹. Ketiga struktur kepemimpinan ini bersama-sama menciptakan struktur sosial dan budaya yang kuat di Minangkabau.

⁷ Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 2.

⁸ Louisa Balk, dkk. *op.cit.*, hal. 41.

⁹ Zulfahmi H. B, *Islam dan Budaya Minangkabau*, (Jakarta: Kartika Insan Lestari, 2003), hal. 148.

¹⁰ Musyair Zainuddin, *Serba-Serbi Adat Minangkabau*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hal. 17-19.

¹¹ M. D Mansoer, dkk., *Sedjarah Minangkabau*, (Jakarta: Bharata, 1970), hal 53-57.

Masyarakat Minangkabau hidup dengan tradisi lisan yang kuat dari masa ke masa¹². Tradisi ini menjadi medium utama untuk mewariskan pengetahuan, nilai, dan legitimasi sosial kepada generasi berikutnya. Namun, tradisi lisan tersebut lambat laun berkembang dalam bentuk tertulis yang dikenal sebagai *tambo*. Sebagai karya sastra masyarakat Minangkabau, *tambo* dipandang sebagai sastra sejarah, yakni penulisan sejarah menurut kepercayaan dan pandangan masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun¹³. Masyarakat Minangkabau kemudian tumbuh menjadi wilayah yang kaya akan karya intelektual seperti manuskrip, atau lebih lazim dikenal sebagai naskah kuno¹⁴.

Adapun Naskah, merupakan harta karun yang belum banyak tergali dan perlu untuk di dalam¹⁵. Karena, naskah adalah warisan peradaban manusia yang secara bertahap terkumpul dari budaya kehidupan masa lalu. Gambaran mengenai perjalanan dan kemajuan suatu bangsa dan budaya tersusun dan tercatat rapi dalam naskah tersebut. Sehingga naskah menjadi peninggalan budaya yang otentik dan masih dapat dirasakan keberadaannya sampai hari

¹² Yona Primadesi, Profil Pelestarian Naskah Kuno Minangkabau, Sumatera Barat, *Jurnal Palimpsest Ilmu Informasi dan Perpustakaan*, 4(1), 2012, hal. 4–5.

¹³ Fikri Surya Pratama, Nilma Yola, dan Nurul Izzati Husni, “Pengaruh Islam pada Tambo dalam Narasi Sejarah Asal Muasal dan Transformasi Sosial Masyarakat Minangkabau,” *Tambo: Journal of Manuscript and Oral Tradition*, 1(1), 2023, hal. 1-13.

¹⁴ Yulfira Riza, Undang-Undang Adat Lembaga (Padang: Museum Adityawarman, 2024), hal. 1.

¹⁵ Pramono, Potensi Naskah-Naskah Islam di Minangkabau Untuk Industri Kreatif Sebagai Pendukung Wisata Religi Ziarah Di Sumatera Barat, *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 16(2), 2018, 328–349.

ini¹⁶. Menjadi tugas penting untuk menggali lebih jauh segala rahasia yang tersimpan di dalam naskah agar pengetahuan-pengetahuan di dalamnya tidak hilang begitu saja.

Pandangan ini sejalan dengan Taufiqurrahman, dkk. yang menegaskan bahwa manuskrip Minangkabau tidak hanya sekadar peninggalan budaya, tetapi juga merupakan sumber primer yang kaya untuk mengembangkan kajian Islam dan sejarah lokal. Melalui pendekatan filologi, kodikologi, dan parateks, naskah Minangkabau dapat mengungkap bidang-bidang penting seperti hadis, syari'ah, tasawuf, pendidikan, dan filsafat, sehingga posisinya tidak dapat dipandang sebelah mata dalam studi akademik¹⁷. Oleh sebab itu, penggunaan naskah *Oendang-oendang Adat Limbago* dalam penelitian ini bukan hanya bertujuan mengangkat khazanah lokal, tetapi juga menegaskan bahwa manuskrip Minangkabau merupakan fondasi penting dalam merekonstruksi sejarah kolonialisme dari sudut pandang masyarakat adat.

Berangkat dari kesadaran mendalam mengenai penting dan berharganya naskah, dalam penelitian ini mengungkap bagaimana perjalanan peradaban manusia yang tertuang dalam sebuah naskah berjudul *Oendang-oendang Adat Limbago*. Naskah ini dapat diakses secara daring melalui koleksi Universitas Leiden, yang terbuka untuk umum dan gratis, namun masih tertulis dalam

¹⁶ Yona Primadesi, *loc.cit.*

¹⁷ Taufiqurrahman, dkk. The Existence of the Manuscript in Minangkabau Indonesia and Its Field in Islamic Studies, *Journal of Al-Tamaddun* 16(1), 2021, hal. 125–138.

aksara Arab berbahasa Melayu. Selanjutnya naskah ini juga tersedia dalam bentuk hasil alih bahasa atau transliterasi yang telah dilakukan oleh Yulfira Riza dan dibukukan oleh Museum Adityawarman, Padang, Sumatera Barat.

Dalam penelusuran hasil alih aksara dari naskah *Oendang-oendang Adat Limbago* ditemukan kisah mengenai kedatangan Belanda ke Minangkabau dan perkebangan kepemimpinan Belanda di Minangkabau. Naskah ini juga banyak menyebutkan kosa kata “Komondor”, bahkan secara rinci menyebutkan nama-nama komondor utusan kompeni di wilayah Padang, Solok, Pesisir, dan beberapa wilayah lainnya. Wilayah-wilayah tersebut pada perkembangannya di masa selanjutnya, terakumulasi ke dalam wilayah administratif kolonial dan disebut *Sumatra's Westkust*. Adapun penelitian ini berupaya merekonstruksi kembali bagaimana pemerintahan kolonial Belanda di Padang abad XVII-XVIII M.

Selama ini dalam rekonstruksi historis masa kolonial di wilayah-wilayah yang ada di sepanjang Pantai Barat Sumatera, sumber penelitian banyak disandarkan pada sumber kolonial. Adapun penelitian ini, mencoba menghadirkan pendekatan yang berangkat dari informasi lokal, yakni naskah *Oendang-oendang Adat Limbago*. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membahas bagaimana pemerintahan Kolonial Belanda di Padang sebagai bagian dari wilayah administratif Pantai Barat Sumatera pada abad XVII-XVIII M sebagai sebuah karya ilmiah.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

a. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang di atas kemudian dirumuskan dalam satu pertanyaan yaitu, bagaimana kepemimpinan pemerintah Kolonial Belanda di Padang pada kurun abad XVII-XVIII M? Rumusan ini kemudian difokuskan dalam tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar belakang kehadiran kolonial di Padang?
2. Bagaimana kondisi politik tradisional Minangkabau pada masa pemerintahan Kolonial Belanda?
3. Bagaimana kepemimpinan pemerintahan Belanda di Padang?

b. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian dirincikan dalam tiga batasan, yakni batasan temporal, batasan tematis, dan batasan spasial. Batasan temporal merupakan batasan waktu dalam sebuah penelitian. Oleh karenanya dalam penelitian ini mengambil batasan waktu dalam kurun abad XVII-XVIII M. Batasan ini diambil sesuai dengan waktu awal mula Belanda dengan kompeni dagangnya VOC mulai memasuki kawasan Padang, lantas kemudian VOC runtuh di penghujung abad ke-18 M yang menjadi akhir dari batasan temporal dalam penelitian ini.

Mengingat batasan waktu yang panjang maka penelitian ini menggunakan batasan spasial (batasan tempat) yang hanya mencakup wilayah Padang pada era Kolonial Belanda di bawah serikat dagangnya yaitu VOC. Adapun batasan tematis (batasan tema) dalam penelitian ini agar penelitian lebih fokus dan terstruktur, yaitu terkait pemerintahan Kolonial Belanda di Padang, yang termasuk dalam tema sejarah politik.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bertolak dari latar belakang serta rumusan masalah terkait pemerintahan kolonial Belanda di Padang pada abad XVII–XVIII M berdasarkan naskah *Oendang-oendang Adat Limbago*, maka dapat ditarik simpulan bahwa tujuan dan kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Latar belakang kehadiran kolonial di Padang
- b. Untuk mengetahui dan Mendeskripsikan kondisi politik tradisional Minangkabau pada masa pemerintahan Kolonial Belanda
- c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kepemimpinan pemerintahan Belanda di Padang

2. Kegunaan Penelitian

Adapun secara akademis kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai kontribusi terhadap khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian sejarah lokal, sejarah kolonialisme, dan filologi naskah, yang mengkaji keterkaitan antara teks kuno dengan dinamika politik dan sosial masa lampau. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan pemerhati sejarah dalam memahami pentingnya pelestarian serta analisis kritis terhadap naskah kuno yang memuat dinamika kekuasaan kolonial dan lokal.

D. Penjelasan Judul

Penelitian ini mengangkat judul “Pemerintahan Kolonial Belanda di Padang Abad XVII-XVIII M Berdasarkan Naskah *Oendang-oendang Adat Limbago*”. Adapun penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. *pertama*, pemerintahan Kolonial Belanda. Istilah pemerintahan kolonial Belanda merujuk pada sistem kekuasaan yang dijalankan oleh Belanda di wilayah Nusantara sejak abad ke-17, dimulai dengan dominasi VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), lalu diteruskan oleh pemerintah kolonial setelah VOC dibubarkan pada 1799. Sistem ini ditandai dengan monopoli ekonomi, pembentukan struktur administratif yang terpusat, serta

kontrol militer dan politik terhadap wilayah jajahan, termasuk Padang dan pesisir barat Sumatra¹⁸.

Belanda tidak hanya mendirikan kantor dagang dan benteng, tetapi juga menciptakan model pemerintahan lokal yang menyesuaikan dengan struktur sosial masyarakat setempat. Di banyak wilayah, termasuk di Padang, praktik pemerintahan tidak langsung atau *indirect rule* diterapkan dengan melibatkan elite lokal atau penghulu dalam sistem pemerintahan kolonial¹⁹. Dengan demikian, dalam konteks skripsi ini, istilah tersebut merujuk pada bentuk kekuasaan dan praktik pemerintahan Kolonial Belanda di Padang selama abad ke-17 hingga ke-18 M, sebagaimana tergambarkan melalui jejak dokumenter dan pengaruhnya terhadap tatanan lokal.

Kedua Naskah Oendang-oendang Adat Limbago. Sebelum memahami lebih lanjut mengenai Naskah *Oendang-oendang Adat Limbago*, terlebih dahulu dipahami makna dari naskah kuno. Naskah kuno atau manuskrip adalah dokumen tulisan tangan yang berusia minimal 50 tahun dan memiliki nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, serta ilmu pengetahuan. Naskah kuno biasanya merupakan hasil tulisan tangan sebelum adanya alat cetak atau mesin ketik, berisi informasi tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat

¹⁸ Merle Calvin Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*, 4th ed. (Stanford: Stanford University Press, 2008), hal. 125.

¹⁹ Gusti Asnan, Citra dan Identitas Kota Padang dalam Lintasan Sejarahnya, *Seminar Sehari "Museum Dalam Perspektif Sejarah dan Pendidikan"*, i2021, hal. 1-15

masa lampau seperti adat, sejarah, moral, sosial budaya, atau ilmu pengetahuan tradisional²⁰.

Adapun Naskah *Oendang-oendang Adat Limbago* merujuk manuskrip hasil penulisan sejarah masyarakat lokal di masa lampau, yang di dalamnya merekam nilai-nilai, struktur sosial, dan sistem pemerintahan lokal yang hidup dalam masyarakat pada masa tersebut, serta pemerintahan kolonial dilihat dari perspektif lokal. Naskah ini juga berisi asal usul orang Minangkabau beserta adat dan lembaganya. Teksnya dimulai dengan silsilah raja-raja Minangkabau yang turun dari Iskandar Zulkarnain, kemudian kepada Sri Maharaja Diraja, hingga kepada Datuk Parpatih Sabatang dan Datuk Katomanggungan, dan sebaran wilayahnya²¹.

Berdasarkan penjelasan di atas, judul penelitian ini menunjukkan tujuan untuk mengkaji pemerintahan kolonial Belanda di Padang pada abad XVII–XVIII M dengan menggunakan Naskah *Oendang-oendang Adat Limbago* sebagai sumber primer. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menelaah interaksi antara kekuasaan kolonial dan masyarakat lokal

²⁰ Fitri Handayani, Local Wisdom dalam Hakikat Preservasi Naskah Kuno sebagai Pelestarian Warisan Budaya Bangsa, *Proceeding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci*, 1(1), 2023, hal. 133-147.

²¹ Pramono, *Naskah Oendang-Oendang dan Limbago Koleksi Universitas Leiden*, Jurnalminang.id, 4 Juni 2024, <https://jurnalminang.id/naskah-oendang-oendang-dan-limbago-koleksi-universitas-leiden/>, diakses 20 Mei 2025.

Minangkabau secara lebih autentik, sekaligus merekonstruksi tatanan politik, sosial, dan adat pada masa itu.

E. Kajian Kepustakaan

Studi mengenai keberadaan dan pengaruh pemerintah kolonial Belanda di wilayah pesisir barat Sumatera, termasuk di Padang telah banyak dilakukan oleh peneliti dan sejarwan sebelumnya. Dalam hal ini, penulis juga telah melakukan peninjauan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan keberadaan dan pengaruh pemerintah kolonial Belanda di wilayah Padang pada abad XVII-XVIII M. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas topik ini dan menghasilkan beragam bentuk karya ilmiah, seperti buku sejarah, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sejenisnya.

Diantara penelitian yang berkaitan dengan masalah ini yaitu penelitian Gusti Asnan (2013), dalam artikelnya yang berjudul “*Sejarah Perkembangan Kawasan Kota Lama di Daerah Rawan Gempa Sumatera Barat*”, membahas perjalanan sejarah pertumbuhan Kota Padang, khususnya kawasan Kota Lama, sejak masa VOC hingga era Republik Indonesia. Ia menguraikan bagaimana kawasan Muara menjadi pusat awal perkembangan kota, lalu diperluas ke arah utara, selatan, dan timur Lebih lanjut Asnan juga membahas bagaimana dalam waktu satu setengah abad, Muara Sungai Padang berkembang menjadi sebuah kota kecil yang dipadati oleh gedung-gedung dan gudang-gudang perusahaan,

rumah-rumah pedagang Tionghoa dan pribumi, serta pasar yang dikelola oleh pedagang pribumi²². Selain dalam artikelnya, dalam bukunya yang berjudul *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera* (2007), Asnan juga membahas terkait sejarah maritim di Pantai Barat Sumatera, dan dengan jelas pula membahas terkait dunia niaga, kegiatan pelayaran dan perdagangan yang eksis di Pantai Barat Sumatera pada masa itu. Meski dengan detail pembahasan Pantai Barat Sumatera, namun tak sedikit buku ini turut serta membahas Padang, mengingat Padang merupakan daerah administratif kompeni di Sumatera²³.

Selanjutnya Rusli Amran (1986), dalam bukunya *Padang Riwayatmu Dulu*, membahas mengenai Padang tempo dulu sebagai Kota Metropolitan di pesisir barat Sumatera, serta menjadi pusat kekuatan militer Belanda, khususnya selama Perang Aceh. Amran mencatat bahwa VOC berhasil memanfaatkan konflik antara Minangkabau dan Aceh, yang pada akhirnya melahirkan Perjanjian Painan dan mengakhiri dominasi kekuasaan kedua pihak tersebut. Sejak tahun 1664, VOC telah memonopoli perdagangan di Padang setelah berhasil mengusir para pedagang Aceh melalui *Traktat Painan*, dan pada tahun 1666, Belanda menjadikan Padang sebagai markas besar di wilayah barat Sumatera²⁴.

²² Gusti Asnan, Sejarah Perkembangan Kawasan Kota Lama di Daerah Rawan Gempa Sumatera Barat, *Suluah*, 13(3), 2013.

²³ Gusti Asnan, *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*, (Yogyakarta: Ombak, 2007).

²⁴ Rusli Amran, *Padang Riwayatmu Dulu*, (Padang: Mutiara Sumber Widya, 1986).

Buku karya Anwar Falah, Riza Mutia, dan Lisa Sri Dwiyanana (2000), dengan judul *Menyungkap Riwayat dan Pesona Kota Padang Lama yang Tersisa*, membahas mengenai sejarah Padang jauh sebelum era kolonialisme yaitu pada masa Kerajaan Minangkabau. Secara runtut buku ini menjelaskan pendudukan Aceh di Pantai Barat Sumatera, dilanjut kekuasaan kolonial Belanda di bawah kongsi dagangnya yaitu VOC. Buku ini juga menyingkap gambar dari bangunan-bangunan tua di Kota Padang lama yang tersisa, lengkap dengan lokasi bangunan tersebut berada dan kegunaannya²⁵.

Terdapat pula buku berjudul *Paco-paco (Kota) Padang*, karya Freek Colombijn. Secara khusus Colombijn membahas mengenai sejarah sebuah kota di Indonesia pada abad ke-20 M dan penggunaan tata ruang kota tersebut. Namun, buku ini juga menceritakan mengenai sejarah Kota Padang dari masa awal kedatangan kolonial dalam sebuah bab khusus dengan judul “Sejarah Kota Padang”. Lebih lanjut juga membahas mengenai konteks geografis dan demografis Padang. Colombijn menyoroti interaksi antara kekuasaan kolonial dan masyarakat lokal dalam membentuk struktur kota, termasuk bagaimana kebijakan kolonial mempengaruhi tata ruang dan kehidupan sosial di Padang²⁶.

²⁵ Anwar Falah, Riza Mutia, dan Lisa Sri Dwiyanana, *Menyungkap Riwayat dan Pesona Kota Padang Lama yang Tersisa*, (Padang: Museum Negeri Provinsi Sumatera Barat “Adityawarman”, 2000).

²⁶ Freek Colombijn, *Paco-paco (Kota) Padang Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2006).

Mustika Zed (2009), dalam bukunya berjudul *Kota Padang Tempo Doeloe (Zaman Kolonial)*, membahas tentang sejarah Kota Padang yang beruntung hidup dalam tiga zaman, yaitu zaman Kolonial Belanda, zaman pendudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan). Meski buku ini fokus menyoroti sejarah pertumbuhan dan perubahan Kota Padang abad ke-20 M, namun untuk menghantarkan pemahaman tentang Kota Padang modern, lebih dulu di bahas bagaimana perkembangan Kota Padang dari masa kolonial²⁷.

Buku berjudul *Sejarah Kota Padang* karya Mardanas Sofwan, Ishaq Taher, Gusti Asnan dan Syafrizal. Buku ini berisi lintasan sejarah Kota Padang sampai tahun 1950, selain itu terdapat pula bahasan mengenai struktur kota dan hubungan Padang dengan daerah pedalaman²⁸.

Artikel Nur Laely yang diangkat dari Tesinya berjudul *Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942*, membahas transisi dari sistem pemerintahan tradisional ke sistem kolonial di wilayah Bonthain, Sulawesi Selatan. Studi ini mengeksplorasi administrasi kolonial, pengaruhnya terhadap politik, dan aktivitas ekonomi lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif historis, mencakup tahap heuristik, kritik,

²⁷ Mestika Zed, *Kota Padang Tempo Doeloe (Zaman Kolonial)*, (Padang: Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2009).

²⁸ Mardanas Sofwan, dkk. *Sejarah Kota Padang*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1987).

interpretasi, dan historiografi. Artikel ini menemukan bahwa sistem kolonial mengubah struktur politik dan ekonomi tradisional menjadi lebih modern²⁹.

Selanjutnya buku karya Deddy Arsyah dan Muhammad Ikbal (2024), berjudul *Padang Abad XVII-XVIII: Sejarah Masyarakat dan Tradisi*. Buku ini menyoroti Kota Padang sebagai sebuah kota dengan kompleksitas masyarakat dan budayanya. Serta membahas perubahan kawasan tersebut dari sebuah nagari kuno menjadi pusat perdagangan strategis di Pesisir Barat Sumatera. Buku ini menggambarkan perkembangan Kota Padang pada masa tersebut serta interaksi dan hubungan Padang dengan kolonial³⁰.

Berdasarkan berbagai kajian terdahulu yang telah ditinjau, dapat disimpulkan bahwa studi mengenai keberadaan dan pengaruh pemerintah kolonial Belanda, khususnya VOC, di Padang telah dilakukan dari berbagai sudut pandang, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun spasial. Namun, penelitian terdahulu umumnya menggunakan sumber sekunder dan fokus pada aspek arsitektur atau kronologi umum, sehingga masih terbatas dalam menggali pengalaman masyarakat Minangkabau secara mendalam. Penelitian ini menggunakan naskah *Oendang-oendang Adat Limbago* sebagai sumber primer, sehingga memungkinkan rekonstruksi interaksi antara masyarakat lokal dan

²⁹ Nur Laely, Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942, *Artikel Tesis Universitas Negeri Makassar*, 2018.

³⁰ Deddy Arsyah dan Muhammad Ikbal, *Padang Abad XVII-XVIII Sejarah Masyarakat dan Tradisi*, (Padang: Kabarita, 2024).

pemerintahan VOC secara lebih autentik. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menutup *gap* sebelumnya, terutama terkait dinamika politik tradisional, sosial-ekonomi, dan transformasi budaya Padang pada abad XVII–XVIII M. Penelitian sebelumnya, sejatinya banyak membantu dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan unsur penting yang menentukan arah dan cara kerja peneliti dalam memperoleh, mengolah, dan menganalisis data. Mengingat fokus penelitian ini berkaitan dengan peristiwa masa lampau, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah penelitian yang menggunakan metode yang melibatkan serangkaian langkah yang biasa dilakukan oleh sejarawan untuk merumuskan peristiwa sejarah melalui teknik pengumpulan data dan kritik sumber secara sistematis³¹. Adapun langkah-langkah yang di tempuh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal dari penelitian sejarah, pada tahap ini penulis mengumpulkan data sejarah³², langkah ini merujuk pada tahap pencarian dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan

³¹ Ismaun, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hal. 35-36.

³² Irhas A. Shamad, *Ilmu Sejarah Prespektif Metodologis dan Acuan Penelitian*, (Jakarta: Hayfa Press, 2003), hal. 89.

penelitian. Proses ini melibatkan pencarian berbagai jenis sumber sejarah, baik sumber lisan, tulisan, benda, dan audio visual. Pengertian heuristik dalam konteks metode sejarah adalah kegiatan mencari sumber-sumber, mendapatkan data, atau materi sejarah³³. Heuristik merupakan suatu teknik, suatu ketrampilan, dan seni dalam mencari dan menemukan sumber³⁴. Dapat disimpulkan bahwa heuristik merupakan langkah awal dalam metode sejarah berupa aktivitas mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber sebanyak mungkin untuk dijadikan bahan memasuki tahap selanjutnya dalam penelitian sejarah³⁵. Tahap ini harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan dalam penelitian sejarah relevan dan dapat dipercaya.

Dalam proses penelitian ini, tahap heuristik dilakukan secara menyeluruh melalui penelusuran literatur, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Penelitian ini tidak melibatkan proses wawancara, melainkan murni berbasis kajian Pustaka. Proses pencarian dan pengumpulan sumber dilakukan melalui berbagai kanal, antara lain Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, Perpustakaan Kota Padang, Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, mengunjungi Kantor Arsip Kota Padang serta melalui situs-situs sejarah digital dan arsip daring. Selain itu, peneliti juga

³³ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hal. 56.

³⁴ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah Metode dan Praktik*, (Gresik: JSI Press, 2020), hal. 29.

³⁵ Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2020), hal. 31.

memanfaatkan hasil kajian koleksi Museum Adityawarman. Di samping itu, peneliti juga menelusuri arsip-arsip kolonial dari situs digital resmi seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), arsip Britannica, *Nationaal Archive Netherland*, koleksi *Digital Library Leiden University* serta berbagai situs yang menyediakan informasi mengenai kondisi Kota Padang pada abad ke-17 hingga ke-18

Sumber Sejarah di klasifikasikan berdasarkan bentuk dan sifatnya. Berdasarkan bentuknya, sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi sumber tertulis seperti naskah, arsip VOC, buku sejarah, dan lainnya. Selanjutnya sumber visual berupa peta-peta lama dan foto dokumentasi. Adapun berdasarkan sifat, terdiri dari primer dan sekunder. Sumber primer terdiri atas naskah adat *Oendang-oendang Adat Limbago* dan hasil transliterasi naskah tersebut. Selanjutnya data primer juga didapatkan dari penelusuran arsip kolonial terkait pantai barat sumatera secara umum dan Padang secara khusus. Disisi lain pengumpulan sumber sekunder dalam penelitian ini dilakukan menggunakan studi kepustakaan. Sehingga penelitian ini di dukung oleh banyak sumber sekunder seperti buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal dan sumber lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Adapun dalam praktiknya, terdapat sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses terhadap arsip yang aksesnya tidak dibuka untuk publik. Selain itu, kesulitan juga muncul dari segi

bahasa, dimana beberapa arsip kolonial ditulis dalam bahasa Belanda lama yang sulit dipahami tanpa bantuan ahli atau kamus khusus. Tantangan lain adalah kelangkaan sumber yang secara spesifik membahas Kota Padang abad ke-17 hingga ke-18. Meskipun demikian, seluruh proses heuristik ini menjadi langkah awal Penulis untuk merangkai kembali jejak hubungan antara Padang dan kekuasaan kolonial dalam sejarah Kota Padang.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber adalah upaya untuk menguji keabsahan dan kredibilitas sumber sejarah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan dalam penelitian sejarah adalah sumber yang valid dan dapat dipercaya. Kritik sumber dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah kritik yang dilakukan untuk menguji keaslian sumber sejarah. Adapun kritik internal adalah kritik yang dilakukan untuk menguji kebenaran isi sumber sejarah. Kritik ini dilakukan dengan memeriksa kesesuaian isi sumber dengan fakta-fakta sejarah yang lain. Selain itu, kritik internal juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bias atau kepentingan dari penulis sumber.

Singkatnya, kritik sumber dilaksanakan setelah sumber terkumpul. Kemudian dilakukan pengujian secara ilmiah untuk menentukan otensitas (keaslian) dan integritas (keutuhan) dari sumber sejarah (kritik eksternal). Kemudian melakukan kritik terhadap kebenaran dari sumber tersebut (kritik internal), maka akan diketahui mana sumber yang termasuk dalam

kriteria fakta keras (sudah teruji kebenarannya) atau fakta lunak (masih perlu diuji kebenarannya)³⁶.

Mengikuti langkah dari kritik sumber dalam penelitian sejarah, maka penulis dalam penelitian ini melakukan langkah yang serupa yakni dengan melakukan kritik eksternal dan kritik internal terhadap data yang terkumpul. Kritik ini dilakukan dari hasil temuan dan studi kepustakaan sebagai berikut:

a. Kritik Eksternal

Dalam tahap kritik eksternal, penulis terlebih dahulu menelusuri asal-usul naskah *Oendang-oendang Adat Limbago* sebagai sumber utama penelitian. Langkah ini dilakukan dengan meneliti bentuk fisik naskah, bahan penulisan (kertas, tinta), serta ciri-ciri paleografi (gaya aksara dan ejaan). Penulis juga memperhatikan informasi mengenai tempat penyimpanan naskah, tahun penyalinan. Melalui langkah-langkah ini, penulis berupaya memastikan bahwa naskah tersebut layak dijadikan sumber primer dalam kajian sejarah. Selain naskah, kritik eksternal juga diterapkan terhadap dokumen pendukung seperti arsip kolonial dan literatur sekunder, dengan menelusuri kredibilitas penerbit, latar belakang penulis, dan tahun terbit sebagai bagian dari validasi awal.

³⁶ Abd. Rahman Hamid dan M. Shaleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hal. 47.

b. Kririk Internal

Setelah sumber dipastikan keasliannya, penulis melakukan kritik internal dengan menelaah isi naskah secara mendalam. Penulis membandingkan informasi yang termuat dalam naskah *Oendang-Oendang* dengan sumber-sumber sejarah lain yang relevan, seperti catatan sejarah kolonial Belanda, arsip pemerintahan, dan kajian akademik terdahulu. Penulis mencermati konsistensi isi naskah, misalnya bagaimana adat dan hukum lokal dihadapkan pada sistem pemerintahan kolonial, serta bagaimana narasi tersebut dibingkai oleh penulis naskah. Penulis juga mempertimbangkan kemungkinan adanya bias atau kecenderungan tertentu dalam penulisan naskah. Oleh karena itu, penulis tidak langsung menerima isi naskah sebagai kebenaran mutlak, tetapi mengkaji secara kritis untuk memperoleh makna historis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3. Sintesis

Sintesis dalam metode penelitian sejarah adalah proses menggabungkan dan menyusun fakta sejarah menjadi suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Proses ini dilakukan setelah penulis melakukan kritik sumber dan memperoleh fakta-fakta sejarah yang valid dan dapat dipercaya³⁷. Dalam sintesis ini penulis menggunakan pengetahuan dan

³⁷ Wasino dan Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hal. 99-101.

pemahaman terkait sejarah untuk memberikan makna dan keterkaitan antara fakta-fakta sejarah yang diperoleh. Penulis juga mempertimbangkan berbagai faktor, seperti konteks historis, keterbatasan sumber, dan bias dari penulis sumber.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data melalui pengelompokan sumber yang sesuai dengan susunan dari masing-masing fakta, untuk kemudian dicari hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain berdasarkan eksplorasi atau interpretasi³⁸. Adapun tujuan dari sintesis adalah untuk menghasilkan suatu pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang peristiwa atau fenomena sejarah yang sedang diteliti³⁹. Terdapat 3 pekerjaan pokok dalam tahapan sintesis, yaitu:

a. Klasifikasi

Pada tahap ini, penulis mengelompokkan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, ke dalam kategori-kategori tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengelompokkan isi naskah *Oendang-oendang Adat Limbago*, dokumen sejarah, serta literatur pendukung lainnya ke dalam tema-tema seperti bentuk pemerintahan kolonial, interaksi dengan masyarakat adat, serta sistem hukum dan sosial yang berlaku. Langkah ini dilakukan agar data dapat dianalisis dengan lebih terarah.

³⁸ Sumargono, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2021), hal. 74.

³⁹ Miftahuddin, *Metodologi Penelitian Sejarah Lokal*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hal. 35.

b. Analisis

Setelah data dikelompokkan, penulis melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap tiap bagian data dengan menelaah hubungan antar unsur yang terkandung di dalamnya. Penulis menelusuri bagaimana nilai-nilai adat yang terekam dalam naskah berinteraksi dengan kekuasaan kolonial, dan sejauh mana sistem kolonial memengaruhi struktur sosial masyarakat Padang pada masa itu. Proses analisis dilakukan secara tematik dan kronologis, untuk membangun pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika sejarah yang terjadi.

c. Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan usaha penulis dalam menafsirkan makna dari peristiwa-peristiwa sejarah yang telah dianalisis sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis berupaya menghubungkan data historis yang terkandung dalam naskah dengan konteks sosial-politik abad XVII–XVIII di Padang, serta memahami bagaimana masyarakat adat membangun mekanisme adaptasi maupun resistensi terhadap pemerintahan kolonial.

4. Penulisan

Penulisan dalam penelitian sejarah bukan hanya mengumpulkan fakta-fakta historis, akan tetapi merupakan refleksi dari pemahaman,

pandangan, dan nilai-nilai yang membentuk rekaman sejarah⁴⁰. Metode penelitian sejarah melibatkan eksplorasi historiografi untuk memahami bagaimana narasi sejarah terbentuk, berubah seiring waktu, dan bagaimana pemikiran para penulis sejarah dapat memberikan pengaruh terhadap interpretasi sejarah⁴¹.

Tatkala usai melalui tahapan heuristik, kritik sumber, dan sintesis, maka penelitian sejarah memasuki langkah terakhir yaitu penulisan. Pada tahapan ini, penulis memaparkan hasil dari penelitian yang sudah disintesis dan dianalisis dalam bentuk tulisan dengan menggunakan aturan dan kaidah-kaidah penulisan yang baik dan benar, agar mudah dimengerti⁴². Maka dalam hal ini penulis berusaha memaparkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis akan memaparkan hasil penelitian dengan mendeskripsikan naratif, sehingga dapat ditulis dan dirangkai menjadi suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang dilengkapi dengan sub-sub bab sebagai pelengkap. Setiap bab disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang terperinci tentang isi penelitian ini. Untuk lebih

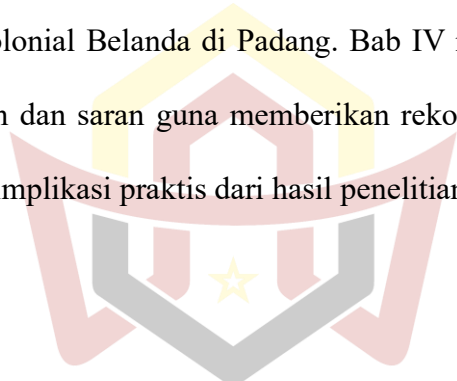
⁴⁰ Wulan Juliani Sukmana, *Metode Penelitian Sejarah, Seri Publikasi Pembelajaran, 1(2)*, 2021, hal. 1-4.

⁴¹ Eva Syarifah Wardah, *Metode Penelitian Sejarah, Jurnal Tsaqofah, Vol. 12(2)*, 2014, hal. 166-175.

⁴² Irhas A Shamad, *op.cit.*, hal. 90.

jelas, penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I adalah Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai pada monografi Padang. Selanjutnya, Bab III menjelaskan mengenai latar kedatangan kolonial ke Padang, serta menguraikan kondisi politik tradisional di Minangkabau, dan kepemimpinan pemerintahan Kolonial Belanda di Padang. Bab IV merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran guna memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut atau implikasi praktis dari hasil penelitian.



UIN IMAM BONJOL
PADANG